

Efektivitas dan Efisiensi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Intan Jaya

Yermias Wambrau⁽¹⁾

Program Magister Manajemen, Universitas Kristen Indonesia Paulus, Makassar, Indonesia
yerrywambrau.nbx@gmail.com

Manuel August Todingbua⁽²⁾

Program Magister Manajemen, Universitas Kristen Indonesia Paulus, Makassar, Indonesia

Corvis L. Rantererung⁽³⁾

Program Magister Manajemen, Universitas Kristen Indonesia Paulus, Makassar, Indonesia

ABSTRACT

This study analyzes the effectiveness and efficiency of direct and indirect spending at the Revenue, Financial Management, and Regional Asset Agency of Intan Jaya Regency. Using a qualitative descriptive approach, this study collected data through observation, interviews, and documentation of ten informants from related agencies. The results of the study indicate that the effectiveness of direct spending is easier to measure because of its direct impact on public services, while the effectiveness of indirect spending is more difficult to evaluate. Budget efficiency is greatly influenced by transparency, accountability, and the application of information technology in regional financial management. The main factors that influence the effectiveness and efficiency of regional spending include the quality of human resources, central government policies, the level of community participation, and the availability of data and information. To improve budget effectiveness and efficiency, a better management strategy, increased employee capacity, and a sustainable evaluation mechanism are needed. With optimal management, it is hoped that the use of regional budgets can provide maximum benefits to the community and support sustainable development.

Keywords: Effectiveness; Efficiency; Direct Spending; Indirect Spending; Regional Financial Management.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis efektivitas dan efisiensi belanja langsung dan belanja tidak langsung di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Intan Jaya. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap sepuluh informan dari instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas belanja langsung lebih mudah diukur karena dampaknya yang langsung terhadap pelayanan publik, sementara efektivitas belanja tidak langsung lebih sulit dievaluasi. Efisiensi anggaran sangat dipengaruhi oleh transparansi, akuntabilitas, serta penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Faktor utama yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi belanja daerah meliputi kualitas sumber daya manusia, kebijakan pemerintah pusat, tingkat partisipasi masyarakat, serta ketersediaan data dan informasi. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi anggaran, diperlukan strategi pengelolaan yang lebih baik, peningkatan kapasitas pegawai, serta mekanisme evaluasi yang berkelanjutan. Dengan pengelolaan yang optimal, diharapkan penggunaan anggaran daerah dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Kata kunci: Efektivitas; Efisiensi; Belanja Langsung; Belanja Tidak Langsung; Pengelolaan Keuangan Daerah.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien merupakan faktor kunci dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik yang berkualitas⁽¹⁾. Di Indonesia, anggaran pemerintah daerah terbagi menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung mencakup pengeluaran yang berhubungan langsung dengan program dan kegiatan yang berdampak pada masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Sementara itu, belanja tidak langsung digunakan untuk pengeluaran administratif, gaji pegawai, dan kegiatan pendukung lainnya⁽²⁾. Efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan kedua jenis belanja ini sangat menentukan keberhasilan pembangunan daerah serta optimalisasi penggunaan anggaran publik.

Kabupaten Intan Jaya, sebagai salah satu daerah di Indonesia, menghadapi berbagai tantangan dalam mengelola keuangannya secara optimal. Beberapa permasalahan yang sering muncul adalah keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan anggaran, kurangnya transparansi dan akuntabilitas, serta ketidakseimbangan dalam alokasi anggaran antara belanja langsung dan tidak langsung. Laporan keuangan daerah menunjukkan bahwa sering terjadi inefisiensi dalam realisasi belanja, yang berakibat pada ketidaktercapaian tujuan pembangunan yang telah direncanakan⁽³⁾.

Fenomena ini mengindikasikan bahwa meskipun alokasi anggaran telah dilakukan sesuai dengan kebijakan yang berlaku, masih terdapat kendala dalam implementasi yang menyebabkan efektivitas belanja belum optimal. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran masih rendah, sehingga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan belanja daerah masih menjadi tantangan tersendiri⁽⁴⁾. Oleh karena itu, penelitian mengenai efektivitas dan efisiensi belanja langsung dan belanja tidak langsung menjadi sangat penting untuk dilakukan guna memberikan rekomendasi strategis bagi pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis efektivitas belanja langsung dan belanja tidak langsung di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Intan Jaya.
2. Mengevaluasi efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja langsung dan belanja tidak langsung.
3. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi belanja daerah serta memberikan rekomendasi strategis untuk perbaikan pengelolaan anggaran di Kabupaten Intan Jaya.

Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif dan efisien, terutama dalam konteks pemerintahan daerah di Indonesia. Temuan dari penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta optimalisasi penggunaan anggaran publik untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

TINJAUAN LITERATUR

Efektivitas dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Efektivitas dalam konteks pengelolaan keuangan daerah mengacu pada sejauh mana tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan menggunakan anggaran yang tersedia⁽⁵⁾. Efektivitas belanja daerah menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan suatu pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik dan mendukung pembangunan daerah⁽⁶⁾. Dalam hal ini,

efektivitas belanja langsung dan belanja tidak langsung harus dianalisis secara holistik karena keduanya saling berhubungan dalam mendukung kinerja pemerintahan daerah ⁽²⁾.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa efektivitas belanja langsung lebih mudah diukur karena dampaknya yang langsung terasa oleh masyarakat, seperti dalam pembangunan infrastruktur dan layanan sosial ⁽⁷⁾. Sebaliknya, efektivitas belanja tidak langsung sering kali sulit diukur karena berhubungan dengan operasional pemerintahan dan kegiatan administratif yang mendukung kebijakan pembangunan ⁽⁸⁾. Oleh karena itu, efektivitas belanja daerah perlu dianalisis dengan mempertimbangkan aspek transparansi, akuntabilitas, serta responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat ⁽⁹⁾.

Efisiensi dalam Pengelolaan Anggaran Publik

Efisiensi dalam pengelolaan anggaran publik didefinisikan sebagai kemampuan pemerintah dalam menggunakan sumber daya yang terbatas untuk mencapai hasil yang optimal ⁽¹⁰⁾. Efisiensi belanja daerah sangat bergantung pada mekanisme perencanaan anggaran, sistem pengadaan barang dan jasa, serta pengawasan yang efektif ⁽¹¹⁾. Pengelolaan anggaran yang efisien dapat mengurangi pemborosan dan memastikan bahwa dana publik digunakan sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan ⁽¹²⁾.

Penelitian sebelumnya menyoroti bahwa penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah dapat meningkatkan efisiensi dengan meminimalisir kesalahan administrasi serta mempercepat proses penganggaran dan pengawasan ⁽¹³⁾. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan anggaran juga berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi, karena dapat mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan anggaran ⁽¹⁴⁾.

Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung

Belanja langsung merupakan anggaran yang dialokasikan untuk mendanai program-program yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, dan pendidikan ⁽¹⁵⁾. Sebaliknya, belanja tidak langsung mencakup pengeluaran administratif, gaji pegawai, dan subsidi yang berfungsi untuk mendukung operasional pemerintahan daerah ⁽¹⁶⁾.

Menurut penelitian Paembonan dkk ⁽¹⁷⁾, efektivitas belanja langsung dapat dinilai dari pencapaian indikator kinerja program yang telah ditetapkan. Sementara itu, belanja tidak langsung sering kali sulit diukur efektivitasnya karena berhubungan dengan biaya operasional yang mendukung fungsi pemerintahan secara keseluruhan. Oleh karena itu, strategi optimalisasi belanja daerah perlu memperhatikan keseimbangan antara kedua jenis belanja tersebut untuk memastikan pembangunan daerah berjalan dengan baik tanpa mengabaikan kebutuhan administratif pemerintahan ⁽¹²⁾.

Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas dan Efisiensi Belanja Daerah

Beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi belanja daerah telah diidentifikasi dalam berbagai penelitian sebelumnya. Menurut Husaini ⁽¹⁸⁾, faktor utama yang menentukan efektivitas belanja daerah meliputi kualitas sumber daya manusia, kebijakan anggaran yang tepat, serta transparansi dalam pengelolaan keuangan. Sementara itu, faktor yang mempengaruhi efisiensi belanja daerah mencakup pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengawasan yang ketat, serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran ⁽¹⁹⁾.

Kajian yang dilakukan oleh Sanggalangi et al ⁽¹³⁾ menemukan bahwa penerapan teknologi informasi dalam sistem pengelolaan keuangan daerah dapat meningkatkan efisiensi dengan mengurangi birokrasi yang berbelit serta mempercepat proses pelaporan anggaran. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran juga berkontribusi terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah ⁽²⁰⁾.

Kerangka Konseptual

Berdasarkan kajian literatur yang telah diuraikan, penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa efektivitas dan efisiensi belanja langsung dan belanja tidak langsung saling berkaitan dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah. Efektivitas belanja daerah dipengaruhi oleh faktor transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat, sedangkan efisiensi belanja daerah bergantung pada penerapan teknologi informasi, kualitas sumber daya manusia, serta kebijakan anggaran yang tepat.

Dengan demikian, penelitian ini akan menganalisis efektivitas dan efisiensi belanja langsung dan belanja tidak langsung di Kabupaten Intan Jaya guna memberikan rekomendasi strategis bagi optimalisasi pengelolaan keuangan daerah.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif ⁽²¹⁾ untuk menganalisis efektivitas dan efisiensi belanja langsung dan belanja tidak langsung di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Intan Jaya. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan eksplorasi yang mendalam terhadap fenomena pengelolaan anggaran daerah, dengan mempertimbangkan berbagai faktor sosial, kebijakan, dan dinamika organisasi yang mempengaruhi efektivitas serta efisiensi belanja daerah. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan realitas berdasarkan data empiris yang diperoleh langsung dari sumber penelitian, sehingga memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai kondisi aktual di lapangan ⁽²²⁾.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang terlibat dalam pengelolaan keuangan di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Intan Jaya. Sampel dipilih menggunakan teknik purposive sampling ⁽²³⁾, di mana informan yang dipilih adalah mereka yang memiliki pengalaman serta pemahaman yang mendalam mengenai pengelolaan belanja langsung dan tidak langsung di instansi tersebut. Informan penelitian terdiri dari 10 pegawai yang mencakup kepala badan, staf keuangan, serta pegawai yang bertanggung jawab atas perencanaan dan pengawasan anggaran. Teknik ini digunakan agar data yang diperoleh relevan dan mendukung tujuan penelitian secara optimal.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Intan Jaya, yang merupakan salah satu daerah dengan tantangan pengelolaan anggaran yang cukup kompleks. Kabupaten ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena adanya fenomena yang menunjukkan kendala dalam efektivitas dan efisiensi belanja daerah, seperti ketimpangan alokasi anggaran, keterbatasan sumber daya manusia, serta kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Waktu penelitian berlangsung selama enam bulan, yang mencakup tahap observasi, wawancara mendalam, serta pengumpulan dokumen terkait pengelolaan keuangan daerah.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga metode utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk memahami secara langsung bagaimana proses pengelolaan anggaran berjalan serta bagaimana belanja langsung dan tidak langsung dialokasikan dalam kegiatan pemerintahan daerah. Wawancara mendalam dilakukan kepada informan yang telah dipilih untuk menggali persepsi, pengalaman, serta kendala yang mereka hadapi dalam pengelolaan belanja daerah. Selain itu, dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder, seperti laporan keuangan daerah, dokumen perencanaan anggaran, serta regulasi terkait pengelolaan keuangan daerah yang diterbitkan oleh pemerintah.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yang terdiri dari tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan ⁽²⁴⁾. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi, menyederhanakan, serta mengorganisasi data yang telah dikumpulkan agar lebih fokus pada aspek yang relevan dengan tujuan penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi analitis yang menggambarkan pola-pola yang muncul dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, di mana hasil analisis digunakan untuk merumuskan temuan utama penelitian serta rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja daerah di Kabupaten Intan Jaya.

Dengan pendekatan metodologis ini, penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai tantangan dan peluang dalam pengelolaan keuangan daerah, serta memberikan rekomendasi yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi anggaran.

HASIL

Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini terdiri dari 10 pegawai yang bekerja di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Intan Jaya. Mereka dipilih berdasarkan peran dan keterlibatan langsung dalam pengelolaan keuangan daerah. Dari hasil wawancara, ditemukan bahwa mayoritas responden memiliki pengalaman kerja lebih dari lima tahun di bidang pengelolaan anggaran, dengan latar belakang pendidikan yang beragam, mulai dari ekonomi, administrasi publik, hingga akuntansi.

Sebagian besar responden mengungkapkan bahwa tantangan utama dalam pengelolaan anggaran adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi teknis dalam manajemen keuangan daerah. Selain itu, responden juga menyatakan bahwa penggunaan sistem informasi dalam pengelolaan anggaran masih terbatas, yang menghambat transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan belanja daerah.

Efektivitas Belanja Langsung dan Tidak Langsung

Efektivitas belanja langsung diukur berdasarkan dampaknya terhadap pelayanan publik dan pembangunan daerah. Dari hasil wawancara, beberapa responden menyatakan bahwa belanja langsung yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan telah memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun, terdapat kendala dalam implementasi, seperti keterlambatan realisasi anggaran dan kurangnya koordinasi antarinstansi. Seorang responden menyatakan:

"Program pembangunan infrastruktur sering mengalami keterlambatan karena proses administrasi yang panjang dan koordinasi yang kurang efektif antara instansi terkait." (Wawancara dengan Pegawai BPPKAD, 2024)

Sementara itu, efektivitas belanja tidak langsung lebih sulit diukur karena berkaitan dengan pengeluaran administratif dan operasional pemerintahan daerah. Beberapa responden mengungkapkan bahwa meskipun belanja tidak langsung penting untuk mendukung jalannya pemerintahan, sering kali alokasi anggaran untuk belanja tidak langsung lebih besar dibandingkan dengan belanja langsung. Hal ini menimbulkan kekhawatiran mengenai keseimbangan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Efisiensi Penggunaan Anggaran

Dalam wawancara dengan beberapa pegawai, ditemukan bahwa efisiensi dalam penggunaan anggaran masih menjadi tantangan besar. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi efisiensi adalah kurangnya pemanfaatan teknologi dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran. Seorang responden menyebutkan:

"Kami masih banyak menggunakan metode manual dalam penyusunan laporan keuangan dan pengawasan anggaran, sehingga memakan waktu lebih lama dan rentan terjadi kesalahan." (Wawancara dengan Staf Keuangan, 2024)

Selain itu, proses pengadaan barang dan jasa yang kurang transparan juga menjadi hambatan dalam mencapai efisiensi belanja daerah. Beberapa responden menyoroti perlunya sistem yang lebih akuntabel dalam proses pengadaan untuk mengurangi pemborosan anggaran.

Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas dan Efisiensi Belanja Daerah

Hasil analisis menunjukkan bahwa beberapa faktor utama yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi belanja daerah di Kabupaten Intan Jaya meliputi:

1. Kualitas Sumber Daya Manusia
Responden menyatakan bahwa masih terdapat kekurangan dalam hal pelatihan dan pengembangan kompetensi pegawai di bidang pengelolaan anggaran. Kurangnya

pemahaman tentang regulasi keuangan daerah sering kali menghambat efektivitas implementasi anggaran.

2. **Transparansi dan Akuntabilitas**
Beberapa responden menekankan pentingnya peningkatan transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan penggunaan anggaran masih rendah, sehingga ruang untuk penyalahgunaan anggaran cukup besar.
3. **Pemanfaatan Teknologi Informasi**
Penggunaan sistem informasi dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran masih terbatas. Hal ini mengakibatkan ketidakefisienan dalam pengolahan data keuangan serta keterlambatan dalam pelaporan anggaran.
4. **Kebijakan Pemerintah Pusat**
Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat sering kali berubah dan mempengaruhi alokasi anggaran daerah. Beberapa responden mengungkapkan bahwa kebijakan anggaran yang kurang fleksibel dapat menghambat implementasi program pembangunan di daerah.
5. **Partisipasi Masyarakat**
Responden menyoroti bahwa partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran masih rendah. Padahal, keterlibatan masyarakat dapat meningkatkan transparansi serta memastikan bahwa belanja daerah benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas belanja daerah di Kabupaten Intan Jaya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal perencanaan dan implementasi program pembangunan. Meskipun belanja langsung telah memberikan manfaat bagi masyarakat, keterlambatan realisasi anggaran dan koordinasi yang kurang efektif masih menjadi kendala utama. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa efektivitas belanja daerah sangat dipengaruhi oleh kapasitas manajemen keuangan dan perencanaan yang baik ⁽⁹⁾.

Efisiensi penggunaan anggaran juga masih perlu ditingkatkan, terutama dalam aspek pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan anggaran. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan mempercepat proses administrasi serta mengurangi risiko kesalahan dan penyalahgunaan anggaran ⁽¹³⁾. Oleh karena itu, implementasi sistem informasi keuangan yang lebih modern dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran di Kabupaten Intan Jaya.

Selain itu, faktor-faktor seperti kualitas sumber daya manusia, kebijakan pemerintah pusat, serta partisipasi masyarakat sangat berpengaruh terhadap efektivitas dan efisiensi belanja daerah. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa rendahnya tingkat transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran menjadi salah satu faktor yang menghambat optimalisasi belanja daerah. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kapasitas pegawai, memperkuat kebijakan transparansi, serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan anggaran daerah.

Dengan mempertimbangkan temuan ini, penelitian ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja daerah melalui perbaikan sistem perencanaan anggaran, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini diharapkan dapat mendukung pembangunan yang lebih berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Intan Jaya.

KESIMPULAN

Penelitian ini menganalisis efektivitas dan efisiensi belanja langsung dan belanja tidak langsung di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Intan Jaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas belanja langsung cenderung lebih tinggi karena dampaknya

langsung dirasakan oleh masyarakat, terutama dalam bidang infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Namun, keterlambatan realisasi anggaran serta koordinasi yang kurang efektif antarinstansi menjadi kendala utama dalam implementasinya. Sementara itu, efektivitas belanja tidak langsung lebih sulit diukur karena berfokus pada pengeluaran administratif dan operasional pemerintahan daerah, yang meskipun esensial, sering kali alokasinya lebih besar dibandingkan belanja langsung, menimbulkan ketimpangan dalam distribusi anggaran.

Efisiensi pengelolaan anggaran masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan dan pelaporan keuangan, serta masih rendahnya transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi belanja daerah meliputi kualitas sumber daya manusia, kebijakan pemerintah pusat yang sering berubah, serta tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran. Peningkatan kapasitas pegawai dan penerapan sistem informasi keuangan yang lebih modern diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, data yang diperoleh terutama bersumber dari wawancara dengan pegawai di instansi terkait, sehingga perspektif masyarakat sebagai penerima manfaat dari belanja daerah belum sepenuhnya terwakili. Kedua, penelitian ini hanya berfokus pada satu daerah, sehingga temuan ini mungkin tidak sepenuhnya dapat digeneralisasikan ke daerah lain dengan karakteristik yang berbeda. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang meskipun memberikan wawasan mendalam, tidak dapat mengukur efektivitas dan efisiensi belanja secara kuantitatif dalam bentuk indikator statistik yang lebih konkret.

Sebagai rekomendasi, pemerintah daerah disarankan untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran melalui pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengawasan berbasis digital. Selain itu, pelatihan bagi pegawai dalam bidang perencanaan dan pengelolaan keuangan perlu diperkuat guna memastikan implementasi anggaran yang lebih efektif. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan anggaran juga dapat menjadi strategi penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan memastikan bahwa penggunaan anggaran benar-benar selaras dengan kebutuhan masyarakat.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan studi dengan pendekatan kuantitatif untuk mengukur efektivitas dan efisiensi belanja daerah menggunakan indikator ekonomi dan keuangan yang lebih spesifik. Selain itu, penelitian di berbagai daerah dengan karakteristik yang berbeda dapat memberikan perbandingan yang lebih luas mengenai strategi optimal dalam pengelolaan keuangan daerah di Indonesia. Dengan demikian, hasil penelitian dapat menjadi dasar bagi pengambilan kebijakan yang lebih berbasis bukti dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran daerah.

DAFTAR PUSTAKA

1. Todingbua MA. Merebut Peluang melalui Intellectual Capital. Makassar: Nas Media Pustaka; 2022.
2. Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 292, Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601). 2014;(292). Available from: [https://peraturan.bpk.go.id/Download/28023/UU Nomor 30 Tahun 2014.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/28023/UU%20Nomor%2030%20Tahun%202014.pdf)
3. Paemba CL, Todingbua MA, Tandi A. ANALISIS TINDAKLANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) KABUPATEN MAMASA Program Studi Manajemen , Program Pascasarjana , Universitas Kristen Indonesia ANALYSIS OF FOLLOW-UP ON THE RESULTS OF THE BPK RI AUDIT OF THE. Paulus J Res [Internet]. 2024;1(3):1–9. Available from: <http://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/pjr/article/view/632>
4. Tasuan VM, Manane DR. Partisipasi Masyarakat, Transparansi, dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa Lada Mese, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Public Manag Account Rev. 2024;5(1):96–109.
5. Mardiasmo D, Barnes P, Sakurai Y. Implementation of Good Governance by Regional Governments in Indonesia: The Challenges. Proc Contemp Issues Public Manag Twelfth Annu Conf Int Res Soc Public Manag (IRSPM XII) [Internet]. 2008;1–36. Available from: <https://eprints.qut.edu.au/15321/1/15321.pdf>
6. Putra R, Hidayat S. Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan Hubungannya Dengan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi. J Perspekt Pembiayaan dan Pembang Drh.

- 2016;3(4):243–56.
7. Yoga. Efektivitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (apbdes) dan indeks desa membangun (idm) desa pungkur kecil kecamatan sungai kakap kabupaten kubu raya. Curvanomic [Internet]. 2022;(Idm):1–14. Available from: <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jcc/article/download/49962/75676595430>
8. Kementrian Keuangan Republik Indonesia. Webpage. 2022 [cited 2025 Jan 13]. Mandatory Spending. Available from: <https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apakah-yang-disebut-dengan-mandatory-spending>
9. Medea F, Sabandar SY, Badawi R. ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TORAJA UTARA. J Mark Manag Innov Bus Rev [Internet]. 2024;2(1):45–51. Available from: <https://www.ojsapaji.org/index.php/mariobre/article/view/226>
10. Hidayati Y, Ali H. Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. J Mirai Manag. 2023;8(1):250–7.
11. Retnosari MC, Suryawati C, Harto P. Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Anggaran di RSUP Dr. Kariadi Semarang. J Manag Kesehat Indones. 2022;10(3):231–40.
12. Rahman AZ, Saputra FL. Efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Cilacap. Humanika. 2022;22(2):117–26.
13. Sanggalangi AD, Rantererung CL, Halik JB. Evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan di Inspektorat Provinsi Papua Tengah. ECOHOLIC J Ekon Holistik [Internet]. 2025;1(1):86–92. Available from: <https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jeh/article/view/862>
14. Hariani N, Malissa M, Todingbua MA. Peran Teknologi dan SDM Dalam Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Intan Jaya. ECOHOLIC J Ekon Holistik [Internet]. 2025;1(1):79–85. Available from: <https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jeh/article/view/861>
15. Gulo E, Telaumbanua A, Waruwu S, Batee MM, Kakisina SM. Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Belanja Operasional Kantor Pencarian Dan Pertolongan Kelas B Nias. J Ilm Metansi (Manajemen dan Akuntansi). 2024;7(1):227–32.
16. Pemerintah Republik Indonesia. PP RI No.58. Indonesia; 2005. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Available from: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/49730/pp-no-58-tahun-2005>
17. Paembonan R, Ma'na P, Halik J. Analisis akuntabilitas kinerja keuangan daerah di kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang kabupaten biak provinsi Papua. J Mark Manag Innov Bus Rev [Internet]. 2024;02(2):1–6. Available from: <https://www.ojsapaji.org/index.php/mariobre/article/view/254/143>
18. Husaini. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFEKTIVITAS UNIVERSITAS BENGKULU Husaini Siti Aisyah Hasrini Verawati. J Univ Bengkulu. 2015;2(1):47–68.
19. Randan F, Todingbua MA, Buku A. Efektifitas Pelayanan dan Penyediaan Sarana / Prasarana dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Tingkat Sekolah Dasar Dilingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire. ECOHOLIC J Ekon Holistik [Internet]. 2025;1(1):101–7. Available from: <https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/jeh/article/view/864/712>
20. Sarjito A. Efektivitas Kebijakan Sosial dalam Mengurangi Ketimpangan Pendapatan dan Angka Kemiskinan. J Ilmu Sos Polit dan Hum. 2024;6(2):1–12.
21. Sugiyono. Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta; 2020. 1–234 p.
22. Fiantika FR, Wasil M, Jumiyati S, Honesti L, Wahyuni S, Mouw E, et al. Metodologi Penelitian Kualitatif. Pertama. Rake Sarasin. Padang: PT. GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI; 2022. 72 p.
23. Sekaran U, Bougie R. Research Method for Business. 6th ed. Jakarta: Salemba Empat; 2017. 280 p.
24. Miles MB, Huberman AM, Saldana J. Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. 3rd ed. California: SAGE Publications Inc; 2014.